

Judul : Nasib pembudi daya ikan, produksinya melimpah, pasarnya belum jelas
Tanggal : Senin, 10 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Nasib Pembudi Daya Ikan Produksi Melimpah, Pasarnya Belum Jelas

PEMERINTAH diminta memberikan perhatian serius terhadap hilirisasi dan tata niaga sektor perikanan budi daya. Saat ini, persoalan utama yang dihadapi para pembudi daya ikan bukan lagi pada tahap produksi, melainkan pada aspek pemasaran dan kesejahteraan pelaku usaha kecil.

Anggota Komisi IV DPR Slamet mengungkapkan, para pembudi daya ikan di daerah telah berhasil mencapai produktivitas tinggi. Namun, keberhasilan itu belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan mereka karena tidak adanya jaminan pasar yang jelas.

"Masalah utama bukan lagi produksi. Mereka bisa memproduksi, tapi saat hasilnya tidak terserap pasar, kesejahteraan para pembudidaya tidak terjamin," ujar Slamet, dalam keterangannya, Minggu (9/11/2025).

Dia bilang, Pemerintah kini perlu fokus mengembangkan rantai pasok dan pasca produksi, agar hasil budi daya ikan bisa diolah menjadi produk bernilai tambah. Dengan demikian, para pembudi daya tidak hanya bergantung pada penjualan ikan segar, tetapi juga bisa menikmati keuntungan lebih melalui diversifikasi produk.

Lebih lanjut, Slamet menyoroti ketimpangan dalam rantai bisnis perikanan budi daya. Saat ini keuntungan terbesar justru dinikmati tengkulak dan pelaku logistik, termasuk para penjual pakan ikan. "Ini jadi pekerjaan rumah bagi

kami di DPR untuk mendorong pemerintah memperbaiki tata niaga, supaya pembudi daya tidak terus-menerus dirugikan," tegasnya.

Dia juga mengusulkan agar pemerintah memberikan insentif dan dukungan kerja sama dengan pihak swasta, termasuk sektor usaha makanan bergizi. Sehingga produk hasil budi daya ikan dapat diserap lebih luas di pasar domestik.

"Produksi sudah melimpah. Sekarang tugas Pemerintah memastikan hasil itu terserap, salah satunya melalui kerja sama dan pemberian insentif," tambahnya.

Senada, anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo menyarankan Pemerintah untuk menghidupkan kembali kebijakan harga berpihak bagi produk rakyat, termasuk hasil budi daya ikan. Salah satunya adalah dengan menyerap hasil produksi masyarakat untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Firman menilai, keberhasilan para pembudi daya ikan tidak akan optimal tanpa jaminan pasar dari Pemerintah. Untuk itu, perlu ada kontrak jangka panjang antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Badan Gizi Nasional (BGN), agar hasil produksi ikan masyarakat terserap secara berkelanjutan.

Dia mengatakan, di era Presiden Soeharto, Pemerintah memberikan harga khusus untuk produk rakyat baik petani, nelayan, maupun industri dalam negeri. ■ PYB